

# EFEKTIFITAS FASILITASI BP3K Mendukung Swasembada Pangan Nasional di Kabupaten Rembang

Roostian Moordiani, dan Christiana Noviani I

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Gatot Subroto Kompleks Tarubudaya Ungaran

## Abstrak

Mendukung program sawasembada pangan nasional, BP3K menjadi pusat koordinasi dari berbagai intitusi/lembaga, sehingga peran dan fungsinya perlu ditingkatkan. Kementerian pertanian melalui Badan PPSDM Pertanian memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebagai posko program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pertanian swasembada berkelanjutan padi jagung dan kedelai. Tujuan pengkajian adalah mengetahui efektifitas BP3K serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebagai posko program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian kecamatan mendukung swasembada pangan nasional di Kabupaten Rembang. Pengkajian kualitatif dengan pemilihan lokasi secara sengaja (*purposive*) yaitu Kabupaten Rembang, sebagai populasi BP3K. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara menggunakan kuisioner. Data meliputi data primer dan sekunder, kemudian ditabulasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pengkajian diketahui bahwa efektifitas BP3K di Kabupaten Rembang dari aspek sarana prasarana dan sumber daya manusia belum sesuai standar minimal yang persyaratan; aspek SDM jumlah penyuluh belum ideal serta kemampuan penyuluh beragam dalam pendampingi kelompok binaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kegiatan peningkatan kapasitas BP3K meliputi aspek manajemen operasional BP3K sudah sesuai dengan Permentan; aspek Aktivitas meliputi temu teknis, kursus tani, rebug tani, FFD, Penyusunan RDKK, LAKU sangat bermanfaat dalam menggali permasalahan, memecahkan permasalahan usaha tani, transfer informasi teknologi pertanian serta meningkatkan pengetahuan petani; aspek penyediaan data dan informasi sudah dapat dipenuhi meskipun dengan keterbatasan sarpras dan SDM yang ada.

Kata kunci: Penyuluhan, BP3K, Pembangunan Pertanian, efektifitas.

## Pendahuluan

Swasembada padi jagung kedelai (Pajale) merupakan target pembangunan pertanian yang akan dicapai melalui berbagai program pembangunan bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama. Pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh seluruh *stakeholder* baik birokrasi pemerintahan, peneliti, penyuluh, dan partisipasi masyarakat melalui gerakan pemberdayaan petani terpadu. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan.

Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K bab V pasal 8 ayat 2 (d) bentuk kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan. Mendukung program sawasembada pangan nasional balai penyuluhan menjadi pusat koordinasi dari berbagai intitusi dan lembaga, sehingga peran dan fungsi kelembagaan balai penyuluhan

perlu ditingkatkan. Kementerian pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas balai penyuluhan kecamatan sebagai posko program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian kecamatan.

Melihat peran penting BP3K maka diperlukan input berupa sarana, prasarana dan ketenagaan penyuluhan dalam rangka mendukung aktivitas pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan. Sebuah BP3K memiliki standar minimal kepemilikan dan kemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki sesuai Permentan nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. Ketersediaan sarana prasarana yang cukup serta SDM yang handal akan mendukung lancarnya proses penyelenggaraan penyuluhan yang meliputi manajemen operasional, aspek aktivitas serta penyedia data dan informasi.

Aspek tersebut merupakan komponen-komponen yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K secara optimal dan tentunya akan mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui efektifitas BP3K dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebagai posko program dan pelaksana pembangunan pertanian mendukung swasembada pangan nasional di Kabupaten Rembang. Manfaat pengkajian bagi BP3K adalah untuk perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang akan datang, dan bagi pemerintah pusat menjadi saran perbaikan sistem penyuluhan mensukseskan pencapaian target pembangunan pertanian.

Kerangka berfikir dalam pengkajian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka berfikir pengkajian

## **Metodologi**

Pengkajian ini merupakan pengkajian kualitatif hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, melalui pengumpulan dan analisis informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, hasil dan dampak kegiatan penyuluhan pertanian. Kegiatan evaluasi menilai efektifitas atau efensiensi yang digunakan untuk perencanaan dan pengembangan kegiatan selanjutnya.

Lokasi pengkajian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu Kabupaten Rembang. Populasi adalah BP3K yang mendapatkan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebagai posko pembangunan pertanian yang berasal dari dana dekonsentrasi pada tahun anggaran 2015.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuisisioner. Data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan tabulasi data dan dilakukan analisis data baik secara statistik atau cukup analisis kualitatif (Narbuko dan Achmadi, 2013).

## **Hasil dan Pembahasan**

Indikator input tingkat efektifitas balai penyuluhan dilihat dari aspek sarana, prasarana dan SDM sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut :

No	Jenis Sarana Prasarana	Asal Pengadaan	Jumlah
1.	Seperangkat Komputer (monitor, keyboard, CPU dan Printer)	APBN dan swadaya	1-2 paket
2.	Alat Bantu Penyuluhan (Wireless, Sound sytem, LCD, White board)	Swadaya	1 unit
3.	Sarana Komunikasi publikasi (Telepone, Kamera, Handycam)	APBD	1 unit
4.	Sarana meubelair (Meja + Kursi kerja, Meja + Kursi rapat – pelatihan, Lemari buku arsip, Rak buku perpustakaan)	APBD, Swadaya, bantuan poktan	10 paket; 10 – 20 buah; 1 buah
5.	Hasil publikasi (Leaflet, Brosur, Buku)	APBN, APBD swadaya	
6.	Cyber Extention (sebutkan jumlah materi penyuluhan yang diterbitkan/ dimuat di Cybex dan siapa penulisnya)	Pemanfaatan sebatas pada pengambilan materi, untuk pengisian materi masih minim	
7.	Gedung Balai Penyuluhan	APBN	Pemda
8.	Papan nama	APBN	BP3K
9.	Percontohan (Lahan, Kandang, Kolam)	APBD, swadaya	1 unit lahan percontohan
10.	Prasarana administrasi (Buku Tamu, Notulen rapat, Buku Konsultasi)	Swadaya	
11.	Alat peraga (PH meter, Pengukur CH, Alat ukur ubinan, Spesimen basah & Kering)	ABPN, APBD, Swadaya	Masing-masing 1 unit
12.	Fasilitasi penyusunan program (PRA, Monografi, RDK RDK, Programa, RKTP)	APBD, Swadaya	1 unit

Sumber : Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan sarana dan prasarana BP3K belum sesuai standar minimal yang dipersyaratkan. Kepemilikan sarana prasarana dimiliki karena dana swadaya penyuluh sehingga kualitas dan kuantitas masih minimal. Kepemilikan kandang dan kolan juga tidak ada karena keterbatasan keamanan.

Jumlah penyuluh dibandingkan jumlah desa, maka seorang penyuluh memiliki wilayah binaan antara 2 – 3 desa, dengan jumlah kelompok tani antara 8 – 16 poktan ditambah 2 – 3 Gapoktan dan KEP. Idealnya 1 desa 1 penyuluh. Permasalahan adalah keterbatasan jumlah SDM penyuluh karena PP PNS banyak memasuki masa purna tugas, tidak ada perekrutan CPNS penyuluh, dan THL TBPP belum mendapat kepastian status kepegawaian. Selain itu kemampuan dan keahlian penyuluh tidak sama, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM bagi penyuluh sangat minim sehingga dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan penyuluh beragam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebagai posko program dan pelaksana pembangunan pertanian meliputi manajemen

operasional BP3K, aspek aktivitas dan penyediaan data dan informasi. Manajemen operasional BP3K di Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012, mempunyai struktur organisasi BP3K, menyusun program penyuluhan tingkat kecamatan serta telah memiliki jadwal kunjungan dan latihan penyuluh. Kendala yang dihadapi adalah jumlah SDM terbatas, sehingga penyuluh mempunyai tugas fungsi tambahan termasuk administrasi keuangan.

Aspek Aktivitas meliputi temu teknis tingkat kecamatan, kursus tani, rebug tani, FFD, penyusunan RDKK, LAKU. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dan sangat bermanfaat dalam menggali permasalahan, memecahkan permasalahan berkaitan dengan usaha tani, transfer informasi teknologi pertanian serta meningkatkan pengetahuan petani. Kendalanya anggaran kegiatan ini terbatas, sehingga swadaya penyuluh untuk mendukung kelancaran penyuluhan.

Penyediaan Data dan Informasi menjadi salah satu fungsi BP3K dilaksanakan meskipun dengan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki. Cyber extension bagi penyuluh sebagai salah satu sumber informasi untuk diteruskan kepada petani. Berbagai data antara lain luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas, data kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani serta data ketenagaan telah tersedia di BP3K.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

1. Efektifitas BP3K di Kabupaten Rembang sebagai berikut :
  - a. Aspek sarana prasarana di BP3K belum sesuai standar minimal yang persyaratkan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012, sehingga terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam kelancaran penyelenggaraan penyuluhan di lapangan.
  - b. Aspek SDM Penyuluh PNS dalam pendampingan wilayah binaan dan kelembagaan petani belum ideal (1 penyuluh 1 desa) dan kemampuan penyuluh beragam, sehingga pendampingan kepada kelembagaan petani berbeda.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan Peningkatan kapasitas BP3K sebagai posko program dan pelaksana pembangunan pertanian mendukung swasembada pangan nasional di Kabupaten Rembang meliputi :
  - a. Manajemen operasional BP3K di Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012.
  - b. Aspek Aktivitas dilaksanakan keseluruhan, sangat bermanfaat dalam menggali permasalahan, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan usaha tani, transfer

informasi teknologi pertanian serta meningkatkan pengetahuan petani. Kendala anggaran kegiatan ini terbatas.

- c. Fungsi BP3K menjadi pusat penyedia data mendukung program pembangunan pertanian antara lain luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas, data kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani serta data ketenagaan berfungsi dengan baik.

### **Saran**

Saran perbaikan sistem penyuluhan di tingkat BP3K antara lain : dukungan pembiayaan penyediaan sarana prasarana penyuluhan baik anggaran daerah maupun pusat masih perlu untuk diprioritaskan; Pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya guna mendukung tugas dan fungsi penyuluh pertanian PNS dan THL TBPP serta Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh baik PNS, THL TBPP dan PP Swadaya sangat diperlukan.

### **Daftar pustaka**

- Anonim. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Jakarta.
- Anonim. 2006. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2015. Kebijakan dan program pembangunan pertanian 2015 – 2019. Materi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Disampaikan pada Musrenbangtannas 2015 Jakarta, 3-4 Juni 2015.
- Kementerian Pertanian. 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. Jakarta.
- Lesmana, D. 2007. Kinerja balai penyuluhan di Kota Samarinda. Jurnal EPP 4 (2): 24 – 31.
- Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Narbuko, C dan Achmadi, A. 2013. Metodologi Penelitian. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- Oktabriyanti, A. 2014. Efektivitas kerja balai penyuluhan pertanian Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Jurnal FISIP 1 (2): Oktober 2014.
- Sadono, D. 2008. Pemberdayaan petani : paradigma baru penyuluhan pertanian di Indonesia. Jurnal Penyuluhan 4 (1) Maret 2008.

- Sudaryanto, T dan Rusastra, I.W. 2006. Kebijakan strategi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan pengentasan kemiskinan. Dicitak ulang dari Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Reprinted from Indonesian Agriculture Research and Development Journal) 25 (4).
- Tapari, H. 2015. Meningkatkan Efektivitas Kursus Tani dengan Metoda Belajar Curah Pendapat. <http://Setbakorluh.jatengprov.go.id>: 4/5/2016.